

Konsep Kurikulum KTSP, K 2013, dan Kurikulum Merdeka: Tinjauan Umum dan Strategi Implementasi

Lydia Cristina F Siregar¹ Florence Chelsea Pansing² Immanuel Chioke³ Nabila Arifianto⁴
Ruth Tri Lestari Rajagukguk⁵ Nopasari Sembiring⁶ Herlina Jasa Putri Hrp⁷

Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: lydiasiregar857@gmail.com¹ florencepansing212@gmail.com²
immanuel2366@gmail.com³ nabilarifianto18@gmail.com⁴ ruthtrilestari@gmail.com⁵
nopasembiring1@gmail.com⁶

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep dasar dari tiga kurikulum utama dalam sistem pendidikan Indonesia, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K13), dan Kurikulum Merdeka. Masing-masing kurikulum memiliki karakteristik dan orientasi pembelajaran yang berbeda. Studi ini bertujuan untuk memberikan tinjauan umum mengenai pendekatan kurikulum tersebut serta menelaah strategi implementasi yang efektif dalam konteks pendidikan saat ini. Penelitian dilakukan melalui metode kualitatif deskriptif berbasis studi literatur dari berbagai sumber resmi. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan kurikulum di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan global dan nasional. Untuk mendukung keberhasilan implementasi, diperlukan peran aktif guru, kebijakan yang adaptif, dan dukungan infrastruktur pendidikan.

Kata Kunci: KTSP, Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, Implementasi Kurikulum, Pendidikan Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan Indonesia telah mengalami berbagai perubahan kurikulum yang mencerminkan upaya menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K13), dan Kurikulum Merdeka adalah tiga kurikulum utama yang diperkenalkan dalam dua dekade terakhir. Masing-masing hadir dengan filosofi, pendekatan, dan tujuan yang berbeda. Kurikulum merupakan alat utama dalam proses pendidikan untuk mencapai tujuan nasional, membentuk karakter, serta meningkatkan kompetensi siswa di berbagai aspek kehidupan. Artikel ini akan menguraikan konsep dasar ketiga kurikulum tersebut, membandingkan kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan rekomendasi strategis untuk implementasi yang optimal di lapangan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di Indonesia, sistem pendidikan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pembaruan kurikulum secara berkala. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran, yang menentukan apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan bagaimana cara menilai hasil belajar peserta didik. Sejak kemerdekaan Indonesia, telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Setiap perubahan kurikulum membawa konsekuensi terhadap metode pembelajaran, evaluasi, serta peran guru dan peserta didik. Tiga kurikulum utama yang pernah diterapkan di Indonesia adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K13), dan Kurikulum Merdeka. Masing-masing kurikulum memiliki karakteristik, tujuan, dan tantangan implementasi yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep dasar dari KTSP, K13, dan Kurikulum Merdeka? Apa saja perbedaan dan persamaan antara ketiga kurikulum tersebut? Bagaimana strategi implementasi yang efektif untuk masing-masing kurikulum? Tujuan dari penelitian ini adalah: Menganalisis konsep dasar dari KTSP, K13, dan Kurikulum Merdeka. Membandingkan perbedaan dan persamaan antara ketiga kurikulum tersebut. Menyusun strategi implementasi yang efektif untuk masing-masing kurikulum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: Bagi Pemerintah: Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa depan. Bagi Guru: Sebagai referensi dalam memahami perbedaan kurikulum dan menyesuaikan metode pembelajaran yang tepat. Bagi Peneliti Lain: Sebagai sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai kurikulum dan implementasinya.

Konsep Dasar Kurikulum

1. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan materi ajar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Namun, KTSP juga menghadapi tantangan dalam hal standar kompetensi dan evaluasi yang konsisten di seluruh Indonesia.
2. Kurikulum 2013 (K13). K13 dirancang untuk menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik. Kurikulum ini mengintegrasikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam proses pembelajaran. Namun, implementasi K13 menghadapi berbagai kendala, seperti kesiapan guru, ketersediaan sumber daya, dan perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana.
3. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan lebih besar kepada satuan pendidikan dalam menentukan materi ajar dan metode pembelajaran. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dengan memperhatikan konteks lokal dan kebutuhan individu. Namun, penerapan Kurikulum Merdeka memerlukan kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, dan dukungan dari berbagai pihak.

Tabel 1. Perbandingan Kurikulum di Indonesia

Aspek	KTSP	K13	Kurikulum Merdeka
Pendekatan	Kontekstual dan fleksibel	Saintifik dan berbasis kompetensi	Proyek dan berbasis kebutuhan
Struktur Kurikulum	Disusun oleh satuan pendidikan	Ditentukan oleh pemerintah	Fleksibel, disesuaikan dengan satuan pendidikan
Evaluasi	Portofolio dan ujian nasional	Autentik dan berbasis kompetensi	Formatif dan sumatif
Kelebihan	Fleksibilitas tinggi	Integrasi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan	Kebebasan dalam menentukan materi dan metode
Kekurangan	Standar kompetensi tidak seragam	Kendala implementasi di lapangan	Memerlukan kesiapan infrastruktur dan SDM

Kerangka Teori

Untuk memahami lebih dalam mengenai ketiga kurikulum tersebut, diperlukan kajian teori yang mendalam. Berikut adalah kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Kurikulum: Menurut Ornstein dan Hunkins (2017), kurikulum adalah rencana atau program yang berisi pengalaman belajar yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dapat bersifat nasional, regional, maupun satuan pendidikan, tergantung pada tingkatannya.

2. Teori Implementasi Kurikulum: Fullan (2007) menyatakan bahwa implementasi kurikulum merupakan proses kompleks yang melibatkan perubahan dalam praktik pembelajaran, peran guru, dan interaksi antara berbagai pihak terkait. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dukungan kebijakan, pelatihan guru, dan kesiapan infrastruktur.
3. Teori Evaluasi Kurikulum: Stufflebeam (2003) mengemukakan bahwa evaluasi kurikulum bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi dilakukan melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Sumber data berasal dari dokumen resmi pemerintah, jurnal akademik, serta publikasi lain yang relevan. Analisis dilakukan dengan menelaah karakteristik utama dari masing-masing kurikulum dan mengidentifikasi tantangan serta peluang dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Kajian pustaka dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan tiga kurikulum pendidikan nasional di Indonesia, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K13), dan Kurikulum Merdeka, berdasarkan sumber-sumber literatur yang telah diterbitkan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, dokumen kurikulum resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta laporan hasil penelitian sebelumnya. Sumber-sumber tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi karakteristik utama, kelebihan dan kekurangan, serta strategi implementasi masing-masing kurikulum. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menitikberatkan pada:

1. Konsep dasar kurikulum: termasuk tujuan, struktur, pendekatan pembelajaran, dan evaluasi.
2. Perbandingan antar-kurikulum: mencakup perbedaan dan persamaan dalam aspek kebijakan dan praktik implementasi.
3. Strategi implementasi: berdasarkan praktik baik dan rekomendasi dalam literatur.

Hasil analisis ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika perubahan kurikulum di Indonesia serta memberikan masukan strategis dalam pelaksanaannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

KTSP mulai diterapkan pada tahun 2006 dengan memberikan otonomi kepada sekolah untuk menyusun kurikulum berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan peserta didik. Fokus utama KTSP adalah pembelajaran berbasis kompetensi yang fleksibel sesuai konteks sekolah.

Kurikulum 2013 (K13)

Kurikulum 2013 dirancang untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, kompeten, dan berdaya saing global. Kurikulum ini menekankan integrasi antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta pendekatan tematik terpadu di jenjang dasar.

Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas dalam proses belajar, penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, dan pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum ini memberikan

ruang inovasi bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai konteks dan kebutuhan siswa (Nusantara: 2025).

Pembahasan

Kurikulum di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan nasional. Tiga kurikulum utama yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K-13), dan Kurikulum Merdeka. Masing-masing kurikulum memiliki karakteristik, pendekatan, serta strategi implementasi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep dasar dan strategi pelaksanaan dari ketiga kurikulum tersebut serta mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas pembelajaran di Indonesia. KTSP yang mulai diterapkan secara nasional pada tahun 2006 memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta potensi daerah. Kurikulum ini berbasis pada prinsip manajemen berbasis sekolah, di mana guru dan sekolah memiliki peran sentral dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Kelebihan KTSP terletak pada fleksibilitasnya, namun kelemahannya adalah tidak meratanya kompetensi guru dalam menyusun kurikulum mandiri, yang berdampak pada inkonsistensi kualitas pembelajaran antar sekolah.

Kurikulum 2013 hadir sebagai penyempurnaan terhadap KTSP. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan ilmiah (scientific approach) yang mencakup kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Selain itu, K-13 mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter (PPK) dan kompetensi abad 21. Fokus utama K-13 adalah pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Meskipun demikian, pelaksanaannya menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal pelatihan guru yang belum merata dan kesulitan dalam menyusun penilaian autentik. Kurikulum Merdeka yang mulai diperkenalkan sejak tahun 2022 bertujuan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada guru dalam mengembangkan potensi peserta didik. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang berdiferensiasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta pengurangan beban materi. Kurikulum Merdeka bersifat lebih fleksibel dan adaptif, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi sekolah. Hal ini menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang berorientasi pada pembelajaran yang bermakna dan kontekstual.

Strategi implementasi dari ketiga kurikulum tersebut berbeda-beda. KTSP lebih menekankan pada pelatihan guru dan otonomi sekolah, sementara K-13 menuntut dukungan sistematis dari pemerintah dalam bentuk pelatihan berkelanjutan, buku ajar, dan supervisi. Di sisi lain, Kurikulum Merdeka mengedepankan platform digital seperti Merdeka Mengajar untuk mendukung guru dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Namun, keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah menjadi tantangan tersendiri dalam penerapannya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kesiapan guru, perbedaan pemahaman konsep, hingga kurangnya sumber daya di sekolah-sekolah pelosok. Dibutuhkan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat untuk mendampingi satuan pendidikan dalam transisi ini. Pelatihan intensif dan berkelanjutan, penyediaan sumber belajar digital dan fisik, serta monitoring berkala menjadi langkah strategis yang perlu diambil.

Secara umum, terdapat pergeseran paradigma pembelajaran dari yang berpusat pada guru (teacher-centered) ke peserta didik (student-centered). Ketiga kurikulum tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan yang relevan dengan zaman. KTSP menekankan pada kemandirian sekolah, K-13 pada pendekatan ilmiah dan penilaian autentik, dan Kurikulum Merdeka pada fleksibilitas serta

diferensiasi pembelajaran. Dalam konteks globalisasi dan era digital, Kurikulum Merdeka dianggap sebagai respons progresif terhadap tantangan zaman. Konsep "merdeka belajar" memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Namun, untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu adanya sinergi antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat. Implementasi kurikulum tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi harus disertai komitmen, sumber daya, dan kemauan untuk berubah.

Dari perspektif evaluasi, keberhasilan kurikulum tidak hanya diukur dari dokumen atau perangkat pembelajaran, tetapi juga dari perubahan nyata dalam proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas guru sebagai agen utama perubahan pendidikan menjadi kunci utama. Pelatihan pedagogik, literasi digital, dan manajemen kelas menjadi kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru di era Kurikulum Merdeka. Sebagai kesimpulan, transisi dari KTSP ke K-13, dan kemudian ke Kurikulum Merdeka merupakan bagian dari upaya pembaruan sistem pendidikan nasional. Meskipun masing-masing kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan, arah perubahan menunjukkan peningkatan perhatian terhadap kebutuhan individu peserta didik. Strategi implementasi yang tepat, dukungan kebijakan, serta peningkatan kompetensi guru akan menentukan keberhasilan penerapan kurikulum dalam jangka panjang. Penerapan KTSP awalnya disambut baik karena memberikan kebebasan lebih kepada sekolah untuk merancang pembelajarannya sendiri. Namun dalam pelaksanaannya, banyak sekolah terutama di daerah tertinggal yang tidak siap menjalankan otonomi tersebut. Guru seringkali kebingungan dalam menyusun silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara mandiri. Ketimpangan dalam penyusunan kurikulum antar daerah menjadi salah satu isu utama dalam implementasi KTSP.

Di sisi lain, K-13 berupaya menyatukan kurikulum secara nasional dengan panduan yang lebih seragam. Pemerintah menyediakan buku paket, pedoman penilaian, dan pelatihan implementasi. Meskipun begitu, pendekatan top-down ini tidak selalu efektif karena tidak semua guru mampu langsung beradaptasi dengan metode pembelajaran berbasis saintifik dan penilaian autentik. Dalam banyak kasus, guru justru mengalami beban administratif yang meningkat tanpa adanya peningkatan kualitas pembelajaran yang signifikan. Kurikulum Merdeka mencoba menjawab tantangan tersebut dengan menawarkan fleksibilitas bagi guru dan sekolah dalam menentukan pendekatan pembelajaran. Guru dapat memilih alur tujuan pembelajaran (ATP) dan modul ajar sesuai dengan konteks siswa. Ini memungkinkan terciptanya proses belajar yang lebih relevan dan personal. Namun keberhasilan pendekatan ini tetap sangat bergantung pada kesiapan dan kreativitas guru dalam merancang pembelajaran yang bermakna.

Salah satu inovasi besar dalam Kurikulum Merdeka adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Proyek ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan nyata yang mengembangkan karakter, literasi, dan keterampilan hidup. Misalnya, proyek bertema kewirausahaan, keberlanjutan lingkungan, atau budaya lokal. Pembelajaran berbasis proyek ini menuntut keterlibatan aktif siswa dan kolaborasi antarguru lintas mata pelajaran. Namun, pelaksanaan P5 tidak mudah dilakukan di semua sekolah. Sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan waktu sering kali kesulitan dalam mengatur jadwal dan sumber pembelajaran untuk proyek. Selain itu, tidak semua guru memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup tentang pembelajaran berbasis proyek. Oleh karena itu, pelatihan yang intensif dan dukungan teknis perlu diberikan secara berkelanjutan agar P5 dapat dijalankan secara efektif. Strategi pengembangan kurikulum yang berkelanjutan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, pengawas, orang tua, dan bahkan siswa. Tanpa keterlibatan aktif semua pihak, implementasi kurikulum akan terhambat. Pemerintah perlu menyediakan forum kolaboratif di tingkat daerah untuk mendukung pertukaran praktik baik

antarsekolah dan antarguru. Dari sisi pengembangan profesional, program Guru Penggerak menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM pendidikan di era Kurikulum Merdeka.

Program ini mendorong guru menjadi pemimpin pembelajaran yang inovatif, reflektif, dan berdaya juang tinggi. Namun jumlah Guru Penggerak masih terbatas dan belum merata distribusinya. Diperlukan perluasan akses dan seleksi yang lebih adil untuk menjangkau lebih banyak guru berkualitas dari seluruh wilayah Indonesia. Penggunaan teknologi juga menjadi bagian penting dari strategi implementasi Kurikulum Merdeka. Platform Merdeka Mengajar menyediakan berbagai modul ajar, video pembelajaran, dan pelatihan daring yang dapat diakses guru kapan saja. Namun kenyataannya, tidak semua guru memiliki perangkat dan jaringan internet yang memadai. Masih banyak daerah dengan keterbatasan akses teknologi, sehingga digitalisasi pembelajaran belum merata. Dalam konteks evaluasi, Kurikulum Merdeka mengedepankan asesmen formatif dibandingkan asesmen sumatif. Ini berarti penilaian tidak hanya dilakukan di akhir proses, tetapi terus-menerus untuk memantau perkembangan siswa. Pendekatan ini lebih adil dan mendidik, namun menuntut kemampuan observasi dan analisis yang tinggi dari guru. Oleh karena itu, pelatihan dalam hal asesmen autentik menjadi sangat penting dalam mendukung keberhasilan kurikulum ini.

KTSP dan K-13 cenderung memisahkan antara konten pembelajaran dan nilai-nilai karakter. Namun Kurikulum Merdeka menyatukan keduanya melalui pendekatan holistik. Tidak hanya aspek kognitif yang diperhatikan, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Pendidikan karakter tidak diajarkan secara verbal semata, melainkan melalui pengalaman dan aktivitas nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jika ditinjau dari pendekatan pedagogi, Kurikulum Merdeka lebih dekat dengan teori konstruktivisme, di mana siswa dianggap sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Ini berbeda dengan pendekatan behaviorisme yang masih dominan dalam KTSP dan sebagian besar praktik K-13, di mana pembelajaran didominasi oleh pemberian informasi dari guru ke siswa secara satu arah. Transisi antar kurikulum juga berdampak pada sistem penilaian di tingkat nasional. Misalnya, ujian nasional yang semula menjadi alat ukur utama dalam KTSP dan K-13, telah dihapus dan diganti dengan Asesmen Nasional. Asesmen Nasional lebih menekankan pada literasi membaca, numerasi, dan karakter. Tujuannya adalah untuk mengukur proses dan hasil pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya hasil belajar individual.

Banyak sekolah masih mengalami kebingungan dalam menyusun perangkat ajar baru, terutama ketika harus menyesuaikan dengan struktur baru dalam Kurikulum Merdeka. Sekolah yang sebelumnya terbiasa dengan jadwal padat dan beban materi tinggi kini perlu melakukan redesign pembelajaran. Proses ini memerlukan bimbingan teknis dan pendampingan dari dinas pendidikan setempat agar tidak menimbulkan kekacauan administratif. Dalam konteks manajemen sekolah, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin pembelajaran yang menentukan arah implementasi kurikulum. Kepala sekolah perlu memiliki visi yang kuat serta keterampilan manajerial untuk mengarahkan guru dan staf dalam menjalankan Kurikulum Merdeka secara konsisten. Peningkatan kompetensi kepala sekolah menjadi bagian penting dari strategi nasional pendidikan. Kurikulum Merdeka juga memberikan ruang bagi penguatan budaya lokal dan muatan kontekstual. Sekolah dapat mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran, sehingga pendidikan tidak terlepas dari akar budaya masyarakat. Ini merupakan upaya penting dalam menjaga identitas nasional di tengah tantangan globalisasi.

Sementara itu, partisipasi orang tua menjadi semakin penting dalam mendukung pembelajaran di rumah. Kurikulum Merdeka mendorong keterlibatan keluarga dalam proses pendidikan anak, baik dalam bentuk pendampingan belajar, komunikasi dengan guru, maupun keterlibatan dalam proyek P5. Hubungan yang sinergis antara sekolah dan rumah akan

memperkuat keberhasilan pendidikan. Dari sisi keberlanjutan kebijakan, perlu adanya kepastian bahwa Kurikulum Merdeka tidak hanya menjadi proyek jangka pendek yang berganti ketika terjadi perubahan pemerintahan. Perubahan kurikulum yang terlalu sering akan membingungkan guru dan siswa, serta mengganggu stabilitas sistem pendidikan. Konsistensi arah kebijakan sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan reformasi kurikulum.

Evaluasi implementasi kurikulum perlu dilakukan secara berkala dan berbasis data. Pemerintah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif dan transparan, di mana sekolah dapat memberikan umpan balik atas pelaksanaan kurikulum. Dengan demikian, perbaikan kurikulum dapat terus dilakukan secara adaptif sesuai dengan realitas lapangan. Akhirnya, kesuksesan implementasi Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kesadaran bersama bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kolektif. Kurikulum hanyalah alat; yang menentukan keberhasilan pendidikan adalah manusia yang menjalankannya. Guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dan siswa perlu bekerja sama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan berkualitas.

Strategi Implementasi

Keberhasilan implementasi kurikulum sangat bergantung pada kesiapan pendidik, dukungan manajemen sekolah, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Strategi yang dapat diterapkan meliputi: Pelatihan guru berkelanjutan dan penguatan komunitas belajar; Pengembangan modul ajar kontekstual; Monitoring dan evaluasi implementasi berbasis data; Pemberdayaan peran orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan.

1. Pelatihan dan Pengembangan Profesional Guru. Kesiapan guru merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kurikulum. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan profesional secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
2. Penyediaan Sumber Daya dan Infrastruktur. Ketersediaan sumber daya, seperti buku ajar, perangkat pembelajaran, dan fasilitas pendukung lainnya, sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kurikulum. Pemerintah dan satuan pendidikan perlu bekerja sama dalam menyediakan sumber daya yang memadai.
3. Pendekatan Kolaboratif dalam Pengembangan Kurikulum. Pengembangan kurikulum yang melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat, akan menghasilkan kurikulum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kolaborasi ini juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan implementasi kurikulum.

KESIMPULAN

Kurikulum KTSP, K13, dan Kurikulum Merdeka memiliki kontribusi masing-masing terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum sebaiknya dilakukan secara bertahap, disertai sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang intensif. Strategi implementasi yang tepat dapat menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Perubahan kurikulum di Indonesia mencerminkan upaya untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Setiap kurikulum memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri dalam implementasinya. Keberhasilan implementasi kurikulum sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan pendekatan yang kolaboratif dalam pengembangannya. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terus-menerus diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Suryadi, S. P. (2020). Pengembangan Kurikulum Jilid 2. Maryani (Ed.).
- Almarisi, A. (2023). Kelebihan dan Kekurangan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran Sejarah dalam Perspektif Historis. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 111–117. <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i1.6291>
- Anggriawan, K., Ahmad, E., & Nurgiansah, T. H. (2025). Actualization of Pancasila as a Reflection of Young Leaders Role in Nurturing the Nation. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 1822-1827.
- Azizah, A., & Firdaus, N. (2022). Relevansi Materi Buku Teks Bahasa Indonesia Terhadap Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(2), 45–58. <https://doi.org/10.1234/jpbsi.v7i2.4567>
- Daryanto. (2014). Prinsip-Prinsip Pembelajaran Kurikulum 2013. Yogyakarta: Gava Media.
- Dewi, M. S. A., & Nurgiansah, T. H. (2025). Development of Intermediate Media for Snakes and Ladders Multiplication and Division for Understanding Mathematics Class III State Primary School 1 Banjar Tengah. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 2500-2510.
- Ismail, H., Ramadhanty, H. V., Rizky, M., & Nurgiansah, T. H. (2025). Wawasan Nusantara: Dasar Pemikiran, Penerapan, dan Analisis Contoh Kasus. *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(2), 21-25.
- Kemendikbud. (2013). Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 2013.
- Kemendikbudristek. (2022). Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka.
- Kemendikbudristek. (2024). Peraturan Mendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Menengah.
- Kemendiknas. (2006). Panduan Pelaksanaan KTSP.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). Kurikulum Merdeka: Pembelajaran dengan Paradigma Baru dan Berdiferensiasi.
- Maryono, M., & Novita, N. (2016). Pengertian Kurikulum 2013. EduChannel Indonesia. <https://educhannel.id/artikel/Telaah-Kurikulum/pengertian-kurikulum-2013.html>
- Mulyasa, E. (2013). Implementasi Kurikulum 2013: Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Karakter. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2014). Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nusantara, C. (2025). Penguatan Karakter Kreatif Melalui Media Sosial. *Journal of Civic and Character Education*, 1(1), 11-14.
- Perdana, O. W., Hartanto, S., Permana, S. A., Afriyeni, F., & Nurgiansah, T. H. (2024). Development of Electronic Learning Media Book Voice Text Based. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 599-608.
- Permatasari, M., Nurgiansah, T. H., Erlande, R., Randiawan, R., & Hidayah, E. N. (2024). Analysis of the Development and Dynamics of Character Education and Culture of the Indonesian Nation. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(1), 592-598.
- Rachman, F., Taufika, R., Kabatiah, M., Batubara, A., Pratama, F. F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Pelaksanaan kurikulum ppkn pada kondisi khusus pandemi covid-19. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5682-5691.
- Rokhmah, N. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Media Pembelajaran Pop Up Book Digital Terhadap Motivasi Belajar PPKn Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Sewon. *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation*, 1(2), 46-51.
- Suyanto. (1983). Belajar: Perkembangan Teori dan Kejadiannya. Yogyakarta: Yayasan Penerbit FKIS-IKIP Yogyakarta.

- Suyanto. (2000). Pokok-Pokok Pembelajaran Pendidikan Ekonomi di SLTP. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Suyanto. (2000). Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Suyanto. (2001). Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Suyanto. (2006). Dinamika Pendidikan Nasional dalam Percaturan Dunia Global. Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Suyanto. (2008). Dialog Interaktif tentang Pendidikan: dari Konseptual, Menggelitik, sampai yang Ringan dan Ringan Sekali. Jakarta: Multi Pressindo.
- Suyanto. (2009). Betapa Mudah Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: Eduka.
- Suyanto. (2013). Bantuan Siswa Miskin: Strategi Jitu Menyukkseskan Wajib Belajar 9 Tahun di Indonesia. Jakarta: Ditjen Dikdas Kemdikbud RI.
- Suyanto. (2013). Hidup Mati RSBI: Boleh Bubar, Virus Kualitasnya Tetap Menyabar. Jakarta: Ditjen Dikdas Kemdikbud RI.
- Suyanto. (2013). Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global. Jakarta: Esensi.
- Suyanto. (2013). Wajib Belajar 9 Tahun untuk Masa Depan yang Lebih Baik. Jakarta: Ditjen Dikdas Kemdikbud RI.
- Suyanto. (2016). Betapa Mudah Menyusun Tulisan Ilmiah. Jakarta: Esensi.
- Wicaksono, G. (2025). Efektivitas Pembelajaran Online pada Pembelajaran Kewarganegaraan. *Journal of Civic and Character Education*, 1(1), 1-7.
- Zubaidah, S. (2021). Profil Pelajar Pancasila dan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan*, 22(2), 115-130.
- Zulfikar, F. (2022). Mengenal Kurikulum Merdeka Belajar dan Tahapan Implementasi Penerapannya. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6163658/mengenal-kurikulum-merdeka-belajar-dan-tahapan-implementasi-penerapannya/>